



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



08  
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK  
INDONESIA EMAS

# LAPORAN KINERJA 2025

(TRIWULAN I)



# TIM PENYUSUN

**Pengarah :**

Rahmat Irfansyah

Muhammad Lukman Faishol

**Penyusun :**

Muhammad Alrizky

**Kontributor :**

Hanna Maryam Meilasari

Muhamad Faisal Siddiq

Pejabat Fungsional Tertentu LKKPN Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kawasan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan 1 Tahun 2025 LKKPN Pekanbaru ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan 1 Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya LKJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKj di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami harap saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 April 2025

Kepala Loka Kawasan Konservasi  
Perairan Nasional Pekanbaru,



Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan.

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Target Kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan I tahun 2025 terdiri 3 indikator kinerja yaitu Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru, dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru. Berdasarkan capaian realisasi dan target indikator kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LKKPN Pekanbaru triwulan 1 tahun 2025 sebesar 109,47 atau berada dalam kategori Baik.

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000, namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp.6.674.918.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp9.324.228.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp. 2.162.628.036 (13,52%) sedangkan berdasarkan pagu efektif setelah proses penghematan, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 23,19%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
1.1. Penjelasan Umum .....	7
1.2. Tugas dan Fungsi .....	8
1.3. Permasalahan Utama .....	8
1.4. Sistematika Laporan Kinerja .....	9
<b>BAB II . PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Rencana Kerja .....	10
2.1.1. Arah Kebijakan .....	10
2.1.2. Sasaran Strategis .....	11
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi .....	12
2.2. Perjanjian Kinerja .....	17
2.2.1. Indikator Kinerja .....	17
2.2.2. Anggaran .....	20
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>21</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	21
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 .....	23
3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai) .....	23
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 .....	29
3.3.1. IK 2. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan) .....	29
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 .....	32
3.4.1. IK 3. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang) .....	32
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 .....	33
3.5.1. IK 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) .....	33
3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 .....	35
3.6.1. IK 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) .....	36

<b>3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 .....</b>	<b>37</b>
3.7.1. IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	37
3.7.2. IK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	40
3.7.3. IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	42
3.7.4. IK 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen).....	43
3.7.5. IK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks). 45	
3.7.6. IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%).....	47
3.7.7. IK 12. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%).....	50
3.7.3. IK 13. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	51
3.7.12. IK 14. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai) .....	54
3.7.8. IK 15 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%).....	56
3.7.11. IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai) ...	57
<b>3.8. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>59</b>
<b><i>BAB IV. PENUTUP .....</i></b>	<b>61</b>
<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>4.2. Tindak Lanjut.....</b>	<b>61</b>
<b>4.3. Rekomendasi.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Penjelasan Umum

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKKPN Pekanbaru memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan terhadap Kawasan konservasi perairan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sampai dengan tahun 2023 terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi (KK) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

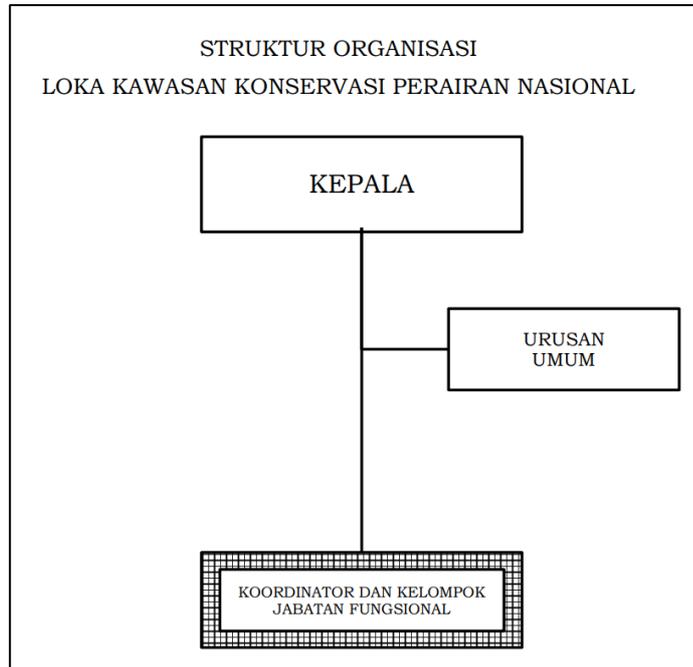
Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

LKKPN Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, dan koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LKKPN mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan pemantauan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk

melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LKKPN Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## 1.3. Permasalahan Utama

Melihat capaian pengelolaan serta kondisi tahun 2024, rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi dasar SDM pengelola di bidang penyadartahuan dan pendampingan masyarakat bersama lembaga/unit kerja yang terkait.
2. Menyusun rencana kebutuhan infrastruktur pendukung serta melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan.
3. Menyediakan sarana informasi yang memadai untuk pelayanan perizinan dan keberadaan kawasan konservasi.
4. Melakukan upaya peningkatan hari layar serta memperluas area jangkauan monitoring bersama pihak terkait.
5. Melakukan pendataan jumlah tenaga kerja pariwisata dan perikanan di sekitar kawasan konservasi.
6. Melakukan pendataan populasi target yang terdampak penjangkauan atas keberadaan kawasan konservasi.

#### 1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja periode Triwulan I tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- b. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.
- d. Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru.
- e. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II . PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Kerja

#### 2.1.1. Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. lima program tersebut adalah (1) Program Pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) Program nilai tambah dan daya saing industry, (3) Program kualitas lingkungan hidup, (4) Program pengelolaan perikanan dan kelautan (5) Program dukungan manajemen.

LKKPN Pekanbaru mendukung Program kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan

Keanekaragaman Hayati Laut dengan sasaran kegiatan “terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau *Appendix CITES*”.

### 2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh LKKPN Pekanbaru ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta arah kebijakan. Sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru 2025 yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan-1 adalah “Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai).
- Sasaran Kegiatan-2 adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru, dengan indikator kinerja : Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan).
- Sasaran Kegiatan-3 adalah Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru, dengan indikator kinerja: Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)
- Sasaran Kegiatan-4 adalah “Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
- Sasaran Kegiatan-5 adalah “Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
- Sasaran Kinerja (SK-6) yaitu “ Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja :
  - Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
  - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
- Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
- Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)
- Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
- Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)
- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)

#### 2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arahan kebijakan Ditjen PKRL sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
  1. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
  2. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
  4. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
  5. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
  6. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL.

Kemudian Arahan Kebijakan LKKPN Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua Kawasan yang *inline* dengan arah kebijakan Ditjen PKRL di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional, kelautan dan perikanan serta strategi Ditjen PKRL di atas, maka dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan LKKPN Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
  - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kep. Anambas Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu, level perak, dan level emas. EVIKA adalah metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tabel 1. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				<b>100</b>
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				<b>100</b>
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				<b>100</b>
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
				<b>100</b>

Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

#### 1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

## 2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2025 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi
- Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi
- Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi

## b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan

konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Upaya Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan di KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Inisiasi Jejaring dan Kemitraan
- Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK

## 2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang *capable*, serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di LKKPN Pekanbaru telah dimulai dengan ditetapkannya LKKPN Pekanbaru sebagai salah satu unit yang dibangun zona integritasnya pada tahun 2019. Pada Tahun 2022, LKKPN Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Keputusan Menteri PANRB nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM tahun 2022. Pembangunan zona integritas di LKKPN Pekanbaru dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 6 (enam) komponen yaitu: manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 2. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
2.	Permen KP No. 37 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
3.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
4.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
5.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034
6.	Kepmen KP No. 53/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
7.	Kepmen KP No. 30 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Dokumen	Judul
8.	Kepmen KP No. 31 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat
9.	Kepmen KP No. 91 tahun 2024	Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
10.	Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020	Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
11.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 56 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
12.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 57 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
13	Kajian / Survei	Arahan teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

### 2.2.1. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja Unit Kerja Ditjen PKRL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran 2024. Perjanjian kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2024 telah ditetapkan pada 25 Januari 2024 yang direvisi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan direvisi kembali pada 30 Desember 2024.

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Kinerja LKKPN Pekanbaru Triwulan 1 Tahun 2024 dan Triwulan 1 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 1 2024		TW 1 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 1 2024		TW 1 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	
3.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	-	-	-	
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	
5.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
		9.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	1	1	1
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	-	-	-	
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	80	100	95	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW 1 2024		TW 1 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	12. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	
	13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
	14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
	15. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	Tidak ada	-	76	100
	16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	Tidak ada	-	-	

Berdasarkan tabel diatas maka jika Sasaran Kegiatan (SK) dan IK 2024 dibandingkan dengan tahun 2025, LKKPN Pekanbaru mendapatkan tiga IK baru yaitu:

1. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru.
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru.

### 2.2.2. Anggaran

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBP sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000, namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp.6.674.918.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp9.324.228.000. Sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.



Gambar 2. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2025

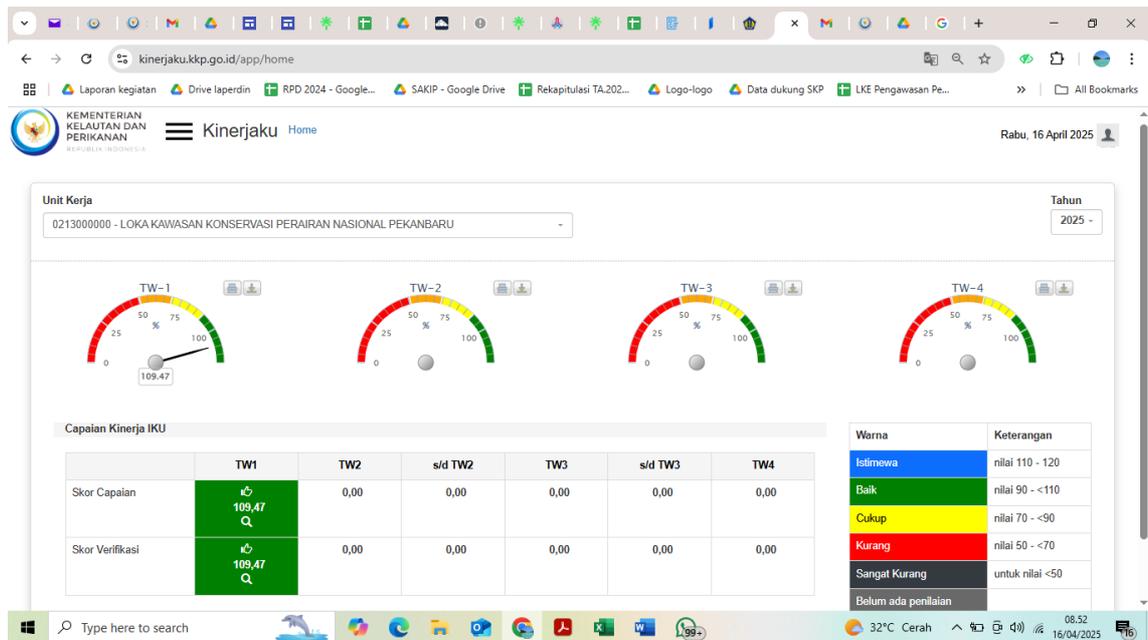
Pagu anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada tahun 2025 terbagi atas tiga program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp5.973.992.000, program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp675.000.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.350.154.000.

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2025 ini dilakukan dengan melakukan penginputan data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS)/ Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK). Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LKKPN Pekanbaru Triwulan 1 tahun 2025 adalah **sebesar 109,47 (Baik)**.



Gambar 3. Nilai NPSK periode triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 2. Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 1 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 1 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	Tahunan
3.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	-	-	-	Tahunan
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	Tahunan
5.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	Tahunan
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Semester
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		9.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	1	1	100	Triwulan
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	-	-	-	Semester
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	95	100	105,26	Tahunan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW 1 2025		NKO	Frekuensi
		Target	Realisasi		
	12. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	Tahunan
	13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
	14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
	15. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76	100	120	Tahunan
	16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan

Tabel 4 di atas merupakan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Kepala LKKPN Pekanbaru dan Direktur Jenderal Kelautan dan Ruang Laut.

### 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

#### 3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai)

Penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LKKPN Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja 1

SK-1		Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-1		Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	86,23	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja 1 merupakan target tahunan yang dapat terpenuhi pada akhir tahun 2025.
- Capaian realisasi 2024 tidak dapat dibandingkan dengan 2025, karena target tahun 2024 merupakan peningkatan persentase sedangkan target tahun 2025 merupakan nilai efektivitas.

Untuk mengulas ulang capaian EVIKA tahun sebelumnya sebagai pembelajaran, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan Konservasi dari perbandingan nilai transformasi EVIKA 2023 dan penilaian EVIKA Tahun 2024 terdapat kenaikan 12,11%. Adapun rincian data tahun-tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika 2022-2024

No	Kawasan Konservasi	Evika 2022-2024			Pengelolaan 2023	Peningkatan 2023 – 2024 (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Kep. Anambas	66,86	72,67	85,10	Dikelola Berkelanjutan	12,43
2	Pulau Pieh	68,15	75,57	87,35	Dikelola Berkelanjutan	11,78
<b>Jumlah</b>						<b>24,21</b>
<b>Rata-rata</b>						<b>12,11</b>

Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang mendukung pada IK 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 1

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi	√	√	15
2.	Inventarisasi Spot Diving dan Snorkeling Kawasan Konservasi	√	√	15
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	√	√	15
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	√	√	15

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	-	15
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
7.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
8.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
9.	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
10.	Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
11.	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
12.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
13.	Konservasi Goes To School	√	√	15
14.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	√	√	15
15.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
16.	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
17.	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	√	15
18.	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
19.	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	√	15

Tabel 8. Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 1

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi	Penerimaan PNBPN di LKKPN Pekanbaru sebesar Rp.70.716.058	Terciptanya tertib pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan/magang dan kegiatan pariwisata alam perairan.

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
2.	Inventarisasi Spot Diving dan Snorkeling Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Lokasi diving dan snorkeling yang tepat
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan konservasi
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Meningkatkan peran serta, dukungan dan aktivitas kegiatan pada 5 (lima) kelompok yang telah menerima bantuan pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
7.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
8.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
9.	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
10.	Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
11.	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
12.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
13.	Konservasi Goes To School	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan wawasan siswa dan mahasiswa terkait konservasi
14.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
15	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan kualitas ekosistem di Kawasan
16	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan kualitas ekosistem terumbu karang
17	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
18	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
19	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Sarana yang bermanfaat bagi Pemberi dan Pengguna Layanan Kawasan Konservasi

Seluruh kegiatan pendukung peningkatan nilai EVIKA masih dalam proses efisiensi anggaran sehingga belum ada realisasi anggaran. Secara rinci capaian kegiatan pendukung nilai EVIKA dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 1

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi	576.504.000	0	0	15
2.	Inventarisasi <i>Spot Diving</i> dan Snorkeling Kawasan Konservasi	166.455.000	0	0	15
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	184.505.000	0	0	15
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	70.028.000	0	0	15
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	197.801.000	0	0	15
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	444.045.000	0	0	15
7.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	84.278.000	0	0	15
8.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	636.890.000	0	0	15

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
9.	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	152.212.000	0	0	15
10.	Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	361.496.000	0	0	15
11.	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	89.576.000	0	0	15
12.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	74.102.000	0	0	15
13.	Konservasi Goes To School	215.495.000	0	0	15
14.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	284.096.000	0	0	15
15.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	220.171.000	0	0	15
16.	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	170.238.000	0	0	15
17.	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	186.044.000	0	0	15
18.	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	163.956.000	0	0	15
19.	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	686.500.000	0	0	15

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Pada triwulan 1 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala efisiensi anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk yang terdiri beberapa pegawai memiliki lebih dari satu kemampuan monitoring sumber daya alam, sehingga lebih efisien dalam melaksanakan tugas monitoring

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja**

Akibat efisiensi anggaran, hingga triwulan 1 belum ada kegiatan pendukung yang dapat terlaksana. Untuk melaksanakan kegiatan masih menunggu proses buka blokir dengan menyesuaikan postur anggaran terbaru.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 2 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi

### **Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 1**

Kegiatan pendukung IK 1 pada Triwulan 1 tahun 2025 yaitu rapat pembahasan progress Indikator Kinerja teknis pada kondisi efisiensi anggaran



Gambar 4. Rapat pembahasan indikator kinerja

### 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

#### 3.3.1. IK 2. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Realisasi capaian dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru untuk mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 10. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025

SK-2		Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-2		Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	1	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 1 adalah target tahunan yang akan dicapai pada akhir tahun.
- Periode Triwulan 1 Capaian realisasi 2024 sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 11. Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja 2

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	15%

Analisis pengukuran capaian IK 2 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen kesepakatan atau perjanjian kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatannya sebagai berikut:

Tabel 12. Progres Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 5

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Pembahasan Peluang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh antara PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dan LKKPN Pekanbaru	Melakukan Kemitraan agar dapat membantu dan besinergi dalam mengelola Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

### Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Belum ada realisasi anggaran karena efisiensi anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 2

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	180.000.000	-	-	15

## **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Pelaksanaan kegiatan terkendala efisiensi anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk yang terdiri beberapa pegawai agar Efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan menggabungkan tim pelaksana kegiatan kemitraan dan Monev Bantuan KOMPAK.

## **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Di tengah efisiensi anggaran, LKKPN Pekanbaru berhasil melaksanakan pembahasan awal Peluang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih

## **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 2 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi.

## **Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 2**

Kegiatan yang dapat mendukung capaian Indikator Kinerja 2 pada Triwulan 1 tahun 2025 adalah pembahasan awal Peluang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih yang dilaksanakan di Kota Padang. Kepala LKKPN Pekanbaru bersama tim, disambut langsung oleh Lufti Nur Hakim selaku Manager PT. PLN IP UBP Teluk Sirih bersama Tim Leader Lingkungan di Ruang Rapat Kantor PT. PLN IP UBP Teluk Sirih. Turut hadir dalam pertemuan ini tim dari PT. Sucofindo Cabang Padang selaku Konsultan Pelaksana Program Lingkungan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan LKKPN Pekanbaru sebelumnya terkait penajakan peluang kolaborasi yang bisa dikerjasamakan dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh. PT. PLN IP UBP Teluk Sirih menyambut baik peluang kolaborasi dan menyampaikan antusiasme terhadap program keanekaragaman hayati yang akan berlokus di Kawasan Konservasi Pulau Pieh ini, juga sekaligus guna mendorong implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.





Gambar 5. Pembahasan Kemitraan dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih

### 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

#### 3.4.1. IK 3. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi

Analisis pengukuran capaian IK 3 adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 3

<b>SK-3</b>		Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-3</b>		masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	15	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 1.

Tabel 15. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Bimtek Layanan Perizinan		√	15
2.	Bimbingan Pemandu Wisata Perairan		√	15

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bimtek Layanan Perizinan	400.000.000	-	-	15
Bimbingan Pemandu Wisata Perairan	300.000.000	-	-	15

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 3 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : kegiatan ini merupakan kegiatan yang diblokir akibat efisiensi anggaran.
- Aspek SDM : pelaksana kegiatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja 3

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada Triwulan II adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi

## 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 LKKPN Pekanbaru adalah Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

### 3.5.1. IK 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
- Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Penilaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, mengenai kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Penilaian Indikator Kinerja ini merupakan target Tahunan dengan jumlah target sebanyak 2 dokumen. target dan capaian Triwulan 1 dapat dilihat pada tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 4

<b>SK-4</b>		Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-4</b>		Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	2	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan 1.

Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung IK 4

Tabel 8. Progres Output dan Outcome Kegiatan pada Triwulan 1

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Sosialisasi dan Verifikasi dan Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPRL	telah terlaksana penilaian teknis terhadap 7 permohonan PKKPR di Kepulauan Anambas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut</li> <li>terlaksananya proses penerbitan persetujuan KKPRL dan/atau konfirmasi KRL di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>terkendalinya pemanfaatan ruang laut di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya serta TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya</li> </ol>
2.	Identifikasi dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> <li>terkendalinya pemenuhan pelaksanaan kewajiban atas</li> </ol>

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
	Pemanfaatan Ruang Laut		<p>pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru</p> <p>2. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan ketentuan zonasinya</p>

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 18. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 4

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Sosialisasi dan Verifikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN	149.570.000	-	-	15
2.	Identifikasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	325.430.000	-	-	15

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

- Aspek Anggaran : telah terlaksana penilaian teknis terhadap 7 permohonan PKKPR di Kepulauan Anambas yang sebagian besar dilaksanakan secara daring
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : secara efektif tim dapat melaksanakan sosialisasi, verifikasi dan identifikasi.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 2 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi

### **Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 4**

Pada Triwulan 1 tahun 2025 telah dilakukan penilaian teknis permohonan PKKPR di Kepulauan Anambas kepada:

1. Stefanus Susanto
2. Eman
3. Suhaidi
4. Harpianto
5. San
6. Kasman
7. Likuang

### **3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5**

Sasaran kegiatan 5 LKKPN Pekanbaru adalah Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

### 3.6.1. IK 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- Jumlah Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia;
- Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia; dan
- Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja 5

SK-5		Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-5		Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	1	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 1
- Identifikasi Pemanfaatan PPK merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

#### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 5

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan PPK	200.000.000	-	-	15

#### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Pada triwulan 1 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala efisiensi anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk untuk melaksanakan identifikasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

#### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja**

Akibat efisiensi anggaran, hingga triwulan 1 belum ada kegiatan pendukung yang dapat terlaksana. Untuk melaksanakan kegiatan masih menunggu proses buka blokir dengan menyesuaikan postur anggaran terbaru.

## **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 2 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi

### **3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6**

Sasaran Kegiatan 6 LKKPN Pekanbaru adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

#### **3.7.1. IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)**

Penilaian IK 6 dilakukan dengan Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Adapun terdapat cara penilaian PM SAKIP, yang sesuai dengan peraturan terbaru PERMENPAN No.88 Tahun 2021 dan yang diacu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

<b>Predikat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
AA	>90-100	Sangat Memuaskan  Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan  Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 6

SK-6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-6		Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	88	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 1

- Capaian realisasi 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 belum dapat dilihat karena IK Tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 6

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	51.000.000	3.759.500	7,37	25
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	132.000.000	11.368.542	8,61	25

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Indikator Kinerja 6 merupakan Nilai PM SAKIP yang didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Layanan perencanaan program serta layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan oleh tim yang sama sehingga efisiensi sumber daya dan anggaran dapat tercapai.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 6 yang telah dilakukan adalah Penyusunan Dokumen perencanaan TA 2025 dan monitoring kinerja organisasi periode Triwulan 1.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 6 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 adalah:

- Melakukan revisi anggaran sesuai dengan persetujuan penggunaan anggaran PNB
- Perlu memperhatikan pembuatan dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas agar penyerapan anggaran dan fisik maksimal.
- Secara tepat waktu melakukan input laporan evaluasi melalui aplikasi online

## Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 6

Dokumentasi	Kegiatan
	(12-17/01), Verifikasi Pelaporan <i>Online</i> Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup DJPKRL melalui Aplikasi e-Monev Bappenas, Kinerja KKP, dan SAKTI Kemenkeu PKRL

### 3.7.2. IK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dibagi atas 4 komponen penilaian yaitu (1) kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, (2) efektivitas pelaksanaan anggaran, (3) efisiensi pelaksanaan anggaran, dan (4) kepatuhan terhadap regulasi. 4 komponen tersebut dijabarkan dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 23 .

Tabel 23. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
<b>Total Nilai</b>		<b>100</b>

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
2. Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
3. Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 7

SK-6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-7		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	92	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target semesteran sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 1
- berdasarkan aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#> nilai IKPA Triwulan 1 2025 adalah 100, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKPA Triwulan 1 tahun 2024 yaitu sebesar 97,94.

### Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 7

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.455.000.000	1.841.164.540	28,52	25
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.397.074.000	1.251.387.213	52,20	25

### Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 7 dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung operasional perkantoran.

### Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

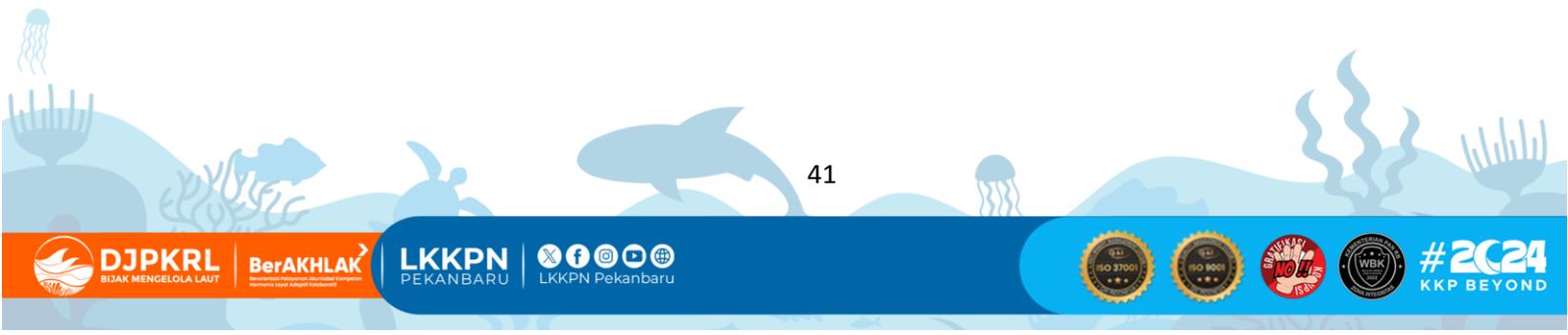
Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 7 yang telah dilakukan adalah:

- Indikator capaian output mendapat nilai maksimal karena melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu melalui aplikasi SAKTI
- Peningkatan nilai IKPA tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran LKKPN Pekanbaru semakin baik.

### Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 7 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 adalah:

- Melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu.
- Melakukan realisasi keuangan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan pada setiap triwulannya.



## **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 7**

Program dan Kegiatan pada Triwulan 1 tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai IKPA:

- Memantau aplikasi Omspan (spanint.kemenkeu.go.id)
- Memaksimalkan pelatihan bendahara dan pengelola anggaran di LKKPN Pekanbaru.
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.
- Memastikan ketepatan input dan ketepatan waktu pelaporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI.

### **3.7.3. IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)**

Capaian pada IKU ini merupakan Target Tahunan sehingga pada triwulan I tidak dilaporkan. Pengukuran didapatkan dari aplikasi SMART DJA. pada akhir tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 8

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-7</b>		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	71,5	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK belum dapat dilihat karena IK dengan target Tahunan yang akan dilaporkan di akhir tahun.
- Capaian realisasi 2025 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena IK Tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tidak ada anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan IK 8.

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Capaian Realisasi Output merupakan indikator paling berpengaruh dalam penentuan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran oleh karena itu petugas perlu melakukan monitoring Capaian Output melalui aplikasi SAKTI pada setiap kegiatan.

## Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 8 yang telah dilakukan adalah:

- Berdasarkan pengamatan pada Aplikasi SMART DJA, NKPA LKKPN Pekanbaru Triwulan 1 tahun 2025 masih nol (0) atau belum ada data.

The screenshot shows the MONEV application interface. The main content area displays a table titled 'NK Perencanaan Satuan Kerja'. The table has columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'Efektivitas' (with sub-column 'Capaian RO'), and 'Efisiensi' (with sub-columns 'Penggunaan SBK' and 'Efisiensi SBK'). The data row shows '1' for No., '032.07.477450' for Kode Satuan Kerja, 'LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU' for Satuan Kerja, and '0,00' for all other metrics. A 'Download Excel' button is visible in the top right. The footer of the application indicates 'Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.' and 'Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-04-09 09:26:50'.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK		
1	032.07.477450	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gambar 6. Tampilan NKPA pada aplikasi monev.kemenkeu

## Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 9 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi.

## Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025:

- Memantau aplikasi SmartDJA.
- Monitoring Realisasi Capaian Output secara tepat waktu dan tepat jumlah.

### 3.7.4. IK 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara sederhana SPIP dapat didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap Triwulan.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 9

SK-6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-9		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
1	1	1	1	100	-	4	25

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IKU 9 adalah 1 dokumen sesuai dengan target Triwulan I 2025 ini yaitu 1 dokumen sehingga persentasenya sebesar 100%.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 sama dengan capaian triwulan 1 tahun 2024.

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dilakukan pengendalian melalui : (1) Pengendalian Rutin, (2) Pengendalian Berkala, (3) Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan I sebagai data dukung Indikator Kinerja telah berisikan hasil pemantauan dari 3 (tiga) unsur pengendalian di atas.

Laporan SPIP periode triwulan I Tahun 2025 telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.466/LKKPN/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 9

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan BMN	65.900.000	15.481.033	23,49	25
2.	Layanan Manajemen Keuangan	64.900.000	8.600.343	13,25	25

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Pelaporan layanan BMN dan manajemen keuangan dapat dilakukan secara online sehingga efisiensi keuangan.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan IK 9:

- LKKPN Pekanbaru meraih penyelenggaraan rekonsiliasi SAKTI terbaik Triwulan III tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL

- Satker dengan penyelenggaraan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) terbaik tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.

**Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 9 yang perlu ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelenggaraan PIPK secara optimal.
- Inventarisasi Barang Milik Negara yang dalam kondisi rusak berat
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKJ agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

**Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14**

Dokumentasi	Kegiatan
	<p>Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode tahun 2024 dan verifikasi online triwulan IV tahun 2024 melalui aplikasi e-Monev Bappenas, Kinerjaaku KKP, dan SAKTI Kemenkeu.</p>

**3.7.5. IK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)**

Capaian pada IK 10 merupakan Target Semester pada Triwulan II dan Triwulan IV. IK ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja dan (4) Disiplin dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. **Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

3. **Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Pengolahan atas hasil penilaian IK akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 10

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-10</b>		Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 10 pada Triwulan I belum dapat dilihat karena IKU Semesteran yang akan dilaporkan di Triwulan II.
- Indikator Kinerja IP ASN ini merupakan target semesteran sehingga belum dapat dipantau pada Triwulan I.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IK 10

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	43.354.000	2.913.750	6,72	25

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 10 memiliki:

- Aspek Anggaran : progres realisasi fisik layanan organisasi dan tata laksana telah mencapai 25%

- Aspek SDM : Mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui daring maupun luring.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 yang telah dilakukan adalah:

- 100% pegawai LKKPN Pekanbaru telah mengisi data dukung sasaran kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 adalah:

- Melakukan monitoring SKP dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.
- Mengawal dan melakukan peningkatan nilai IP ASN hingga akhir tahun 2025 agar target tetap tercapai.

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 10**

Nilai Indikator Kinerja IP ASN pada tahun 2024 LKKPN Pekanbaru sebesar 91,35 berdasarkan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/131> sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut. Namun nilai IP ASN tahun 2025 belum dapat dipantau.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	82	2173	86.92 %	3712	92.8 %	25	83.33 %	5	100 %	88.85	TINGGI
2	DIREKTORAT PENATAAN RUANG LAUT	59	22.08	88.32 %	35.73	89.32 %	28.1	87 %	5	100 %	88.92	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	58	22.07	88.28 %	35.3	88.25 %	25.69	85.63 %	5	100 %	88.06	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	60	2167	86.68 %	38.07	95.17 %	25.75	85.83 %	5	100 %	90.48	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	55	2189	87.56 %	37.37	93.42 %	25	83.33 %	5	100 %	89.26	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	53	2077	83.08 %	40	100 %	27.08	90.27 %	5	100 %	92.85	SANGAT TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	46	20.83	83.32 %	39.57	98.92 %	28.26	94.2 %	5	100 %	93.65	SANGAT TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	49	2078	83.12 %	37.35	93.38 %	27.65	92.17 %	5	100 %	90.78	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	47	20.83	83.32 %	39.79	99.48 %	25.74	85.8 %	5	100 %	91.36	SANGAT TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	28	20.71	82.84 %	38.51	96.28 %	28.93	96.43 %	5	100 %	93.16	SANGAT TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	49	20.65	82.6 %	40	100 %	25.61	85.37 %	5	100 %	91.27	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	40	20.88	83.92 %	38.88	97.2 %	26.5	88.33 %	5	100 %	91.35	SANGAT TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	51	20.9	83.6 %	35.6	89 %	29.71	99.03 %	5	100 %	91.21	SANGAT TINGGI

Gambar 7. Tampilan nilai IP ASN tahun 2024

### **3.7.6. IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)**

Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.104/DJPK.1/HP.190/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 hal Hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada

periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menyatakan LKKPN Pekanbaru telah menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi LHP atau status Tuntas.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja 11

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-11</b>		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
100	80	95	100	105,2	-	95	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru triwulan 1 tahun 2025 sama dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 95% sedangkan capaian realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 105,2%.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 11 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Esselon I terkait temuan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Nilai 100% menggambarkan seluruh hasil pemeriksaan telah dipenuhi.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

LKKPN Pekanbaru memiliki 7 rekomendasi dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi sehingga capaian IK sebesar 100%.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 11 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah:

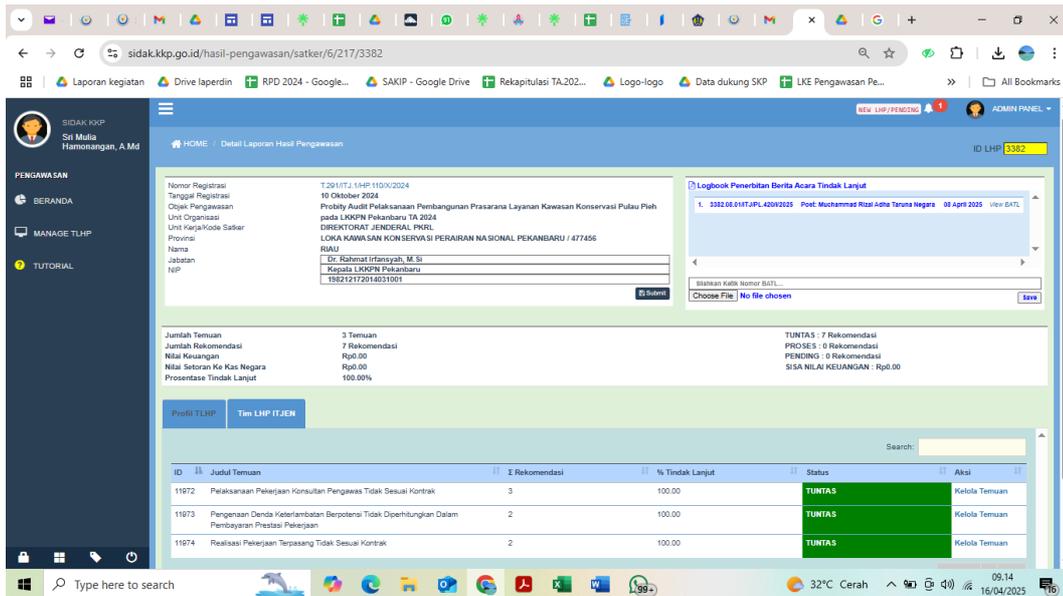
Perlu tetap mempertahankan performa baik, dengan menanggulangi segala rekomendasi temuan yang ada pada triwulan berikutnya apabila terdapat rekomendasi.

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 11**

LKKPN Pekanbaru telah melaksanakan tujuh tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas. Berikut tujuh rekomendasi dan tindak lanjut dimaksud:

Tabel. Rekomendasi dan Tindak lanjut hasil pengawasan Itjen

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memerintahkan Konsultan Pengawas supaya membuat laporan sesuai dengan kontrak (harian, mingguan, bulanan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat PPK LKKPN Pekanbaru Kepada Direktur CV. Mitra Sakinah Consultant Nomor B.3949/BPSPL.4/TU.410/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 perihal Surat Perintah</li> <li>2.Laporan Bulanan, Mingguan, Harian</li> <li>3.Surat Direktur CV Mitra Sakinah Consultant No 113.4.03/MSK/VI/2024 Tanggal 5 Jui 2024 Perihal Permohonan Pergantian Personil</li> </ol>
2	Melengkapi addendum kontrak dengan alasan perubahan serta data dukung administrasi pergantian personel dari Yogi Hadri ST menjadi Gusti Armi, A.Md;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addendum Kontrak 1 Nomor 153 b/LKKPN/PPK.Tender/VI/2024 Taggal 7 Juni 2024</li> <li>2. Addendum Kontrak II Nomor 239/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024</li> <li>3. Data dukung administrasi pergantian Personil</li> </ol>
3	Memerintahkan Konsultan Pengawas supaya membuat absensi harian dengan disertai foto tagging kehadiran tiap personel di lokasi pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah PPK Kepada Konsultan Pengawas Nomor 249/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024</li> <li>2. Bukti Absensi Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontruksi</li> </ol>
4	Memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan (bila Penyedia dinilai mampu) dengan kesediaan dikenakan denda keterlambatan dan melengkapinya dengan memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, sepanjang Penyedia menyampaikan permohonannya dan surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Kontraktor Pelaksana Nomor 01/PPWUPP/SSR/X-2024 tanggal 1 Oktober perihal Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Penyelesaian Pekerjaan</li> <li>3. Surat PPK LKKPN Pekanbaru Nomor 238.a/LKKPN/PPK.e-Purchasing/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan</li> <li>4. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksana dari PT Asuransi Umum Videi beserta surat jaminan No bond 37.91.01.0320.10.24 Senilai Rp106.180.839,83 yang berlaku 120 Hari dari 7 Juni 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024</li> <li>5. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksana dari PT Asuransi Umum Videi beserta surat jaminan No bond 37.91.01.0320.10.24 Senilai Rp106.180.839,83 yang berlaku 30 Hari dari 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024</li> </ol>
5	Menuangkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, peneanaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addendum Kedua Surat Perjanjian Nomor 238.b/LKKPN/PPK.Tender/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dimuat pada pasal 5 ayat (4) yang menyatakan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 30 hari sampai dengan 3 November</li> <li>2. SPM Termin IV dan Bukti Potongan untuk Peneanaan Denda Keterlambatan senilai Rp25.483.402.00</li> </ol>
6	Memerintahkan kepada Penyedia untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai volume dan spesifikasi teknis yang ditetapkan sampai dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak	Surat PPK LKKPN Pekanbaru kepada Direktur CV Sarana Sumber Rezeki Nomor 250/LKKPN/PPK.E-purchasing/IX/202 tanggal 4 Oktober 2024 perikal Surat Perintah yang berisi Intruksi percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai volume dan spesifikasi teknis yang ditetapkan sampai dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak
7	Tidak merealisasikan pembayaran atas selisih kurang volume pekerjaan terpasang yang tidak dibutuhkan senilai Rp26.116.004,00 pada saat pembayaran 100% pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAST Nomor 257/LKKPN/PPK.E-Purchasing/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024</li> <li>3. Berita Acara Pembayaran Nomor 257.a/LKKPN/PPK.E-Phurchasing/X/2024/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 senilai Rp424.723.359</li> <li>4. Kwitansi Nomor 03/KW/X-2024 tanggal 17 Oktober 2024 senilai Rp424.723.359,00;</li> <li>5. Rincian Pengalihan Pekerjaan Senilai 26.202.107,29</li> </ol>



Gambar 8. Tampilan Aplikasi SIDAK

### 3.7.7. IK 12. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Penyelesaian Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LKKPN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 12

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-11</b>		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 12 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 12 merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 12 yang telah dilakukan adalah LHP BPK pada Triwulan I 2025 masih belum ada, sehingga evaluasi lebih kepada menjaga setiap kegiatan agar selalu akuntabel.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 12 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2025 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 12**

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LKKPN Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Setditjen PKRL terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

### **3.7.3. IK 13. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)**

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dengan target nilai 75. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian WBK mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil

WBK  $\geq 75$ . Proses pembangunan Zona Integritas LKKPN Pekanbaru telah dimulai pada tahun 2019.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 13

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-13</b>		Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wiayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	85	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 13 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran IK 13 triwulan 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 13

<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Penyerapan (%)</b>	<b>Fisik (%)</b>
Pelayanan Publik	115,000,000	13,010,583	11,31	25
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17,354,000	2,913,750	16,79	25

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Anggaran dimanfaatkan untuk internalisasi dan sosialisasi WBK/WBBM di LKKPN Pekanbaru, bentuknya dapat berupa sosialisasi verbal, sosialisasi melalui media sosial online maupun mencetak media sosialisasi.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap Unit Kerja yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Tahun 2025 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 25 Februari s.d. 3 Maret 2025. Tujuan pemantauan adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada LKKPN Pekanbaru Tahun 2024 s.d. Maret 2025, dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada TPN Kementerian PAN dan RB. Capaian nilai hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas sebesar 91,04 terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 52,90 dan nilai Komponen Hasil sebesar 38,14. Capaian tersebut menunjukkan bahwa LKKPN Pekanbaru sudah

memenuhi ambang batas minimal nilai yakni sebesar 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48,00 untuk Menuju WBBM.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 ini adalah:

- Melakukan persiapan Evaluasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Inspektorat V KKP
- Melakukan identifikasi pemenuhan dokumen Zona Integritas hingga bulan Juni 2025.

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13**

Pemantauan Pembangunan Zona Integritas terhadap LKKPN Pekanbaru yang dilakukan Inspektorat V KKP secara online (daring) pada tanggal 25 Februari – 3 Maret 2025.



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Y
12	Konservasi di bawah pengelolaan	Pelayanan Publik	1. konservasi Anambas	2. konservasi Anambas	3. konservasi Anambas	4. konservasi Anambas														Leony Siddek
13	rgan upaya pengawasan kawasan	Pengawasan	5. Melakukan upaya pengawasan kawasan melalui wadah Quick Respons dan mensosialisasikan aplikasi Si Spesial	6. Melakukan upaya pengawasan kawasan melalui wadah Quick Respons dan mensosialisasikan aplikasi Si Spesial	7. Melakukan upaya pengawasan kawasan melalui wadah Quick Respons dan mensosialisasikan aplikasi Si Spesial	8. Melakukan upaya pengawasan kawasan melalui wadah Quick Respons dan mensosialisasikan aplikasi Si Spesial														Agus Triono
14	kaneme pemantauan dan pendataan engawal kualitas kinerja kelompok PAK	Peningkatan Akuntabilitas	6. Membuat tools berupa form yang terukur kepada kelompok masyarakat penerima bantuan	7. Membuat tools berupa form yang terukur kepada kelompok masyarakat penerima bantuan	8. Membuat tools berupa form yang terukur kepada kelompok masyarakat penerima bantuan	9. Membuat tools berupa form yang terukur kepada kelompok masyarakat penerima bantuan														Leonard Simbolon
15	ntainya peran unit kerja dalam ndampingan Satuan Kerja Pemerintah alam mendorong peran kolaborasi i kawasan konservasi	Manajemen Perubahan	7. Felibatan stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi	8. Felibatan stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi	9. Felibatan stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi	10. Felibatan stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi														Andriatno Harif
16																				
17	ya sinergitas pengawasan antar smerintahan Daerah, kelompok e Swesday dalam pengelolaan Kawasan ketertahanan masyarakat dalam masi terkait penentuan batas batas konservasi	Manajemen Perubahan	1. Melakukan Sosialisasi Si Spesial	2. Melakukan Sosialisasi Si Spesial	3. Melakukan Sosialisasi Si Spesial	4. Melakukan Sosialisasi Si Spesial														Andriatno Harif
19		Perbaikan Tatakelasana	2. Menyapkan Aplikasi Si Spesial	3. Menyapkan Aplikasi Si Spesial	4. Menyapkan Aplikasi Si Spesial	5. Menyapkan Aplikasi Si Spesial														Tri Harboro
20																				
21		Peningkatan Kapasitas SDM	3. Membuat buku panduan penggunaan Si Spesial	4. Membuat buku panduan penggunaan Si Spesial	5. Membuat buku panduan penggunaan Si Spesial	6. Membuat buku panduan penggunaan Si Spesial														Oki Penda
22		Pengawasan	4. Melakukan evaluasi data Si Spesial	5. Melakukan evaluasi data Si Spesial	6. Melakukan evaluasi data Si Spesial	7. Melakukan evaluasi data Si Spesial														Agus Triono
23		Peningkatan Akuntabilitas	5. Melakukan publikasi pemanfaatan aplikasi Si Spesial	6. Melakukan publikasi pemanfaatan aplikasi Si Spesial	7. Melakukan publikasi pemanfaatan aplikasi Si Spesial	8. Melakukan publikasi pemanfaatan aplikasi Si Spesial														Faisal Siddiq

Gambar 9. Pemantauan Zona Integritas oleh Inspektorat V KKP

### 3.7.12. IK 14. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal.

Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dinilai dengan menggunakan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal selama periode Tahun 2025. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
4. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
5. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
5. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
6. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
7. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
8. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 14

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-14</b>		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 14 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

Dalam rangka Pemusnahan arsip yang akan dilakukan LKKPN Pekanbaru yang direncanakan mencakup dokumen-dokumen Keuangan, Kepegawaian yang berasal dari kurun waktu 2009 hingga 2013 Loka KKP Pekanbaru telah memulai memilah-milah berkas yang akan di musnakan. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkup KKP.

### **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Melakukan pemantauan terhadap nilai kearsipan LKKPN Pekanbaru.

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14**

No	Dokumentasi	Kegiatan
1		(11/3) Pemilahan arsip yang akan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan

### 3.7.8. IK 15 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Metode perhitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut:

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pagu Pengadaan Barang/Jasa x100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja 15

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-14</b>		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Target TW 1</b>	<b>Realisasi TW 1</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kenaikan terhadap TW 1 2024</b>	<b>Target PK</b>	<b>% Realisasi terhadap PK</b>
-	-	76	100	120	-	76	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 15 adalah sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76% sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.

#### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

## **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 15 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus namun tetap dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan Indikator Kinerja maksimal. Dalam pemanfaatan aplikasi <https://sidak.kkp.go.id/> juga merupakan aplikasi berbasis web yang tidak berbayar.

## **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100%. Keberhasilan Indikator ini LKKPN Pekanbaru memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan 100%.

## **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 15 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa 100% sampai dengan akhir tahun 2025.

## **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 15**

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP adalah:

- Melakukan input data kegiatan Institusi LKKPN Pekanbaru pada laman [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id).
- Melakukan pemutakhiran rutin data rencana umum pengadaan lingkup LKKPN Pekanbaru

### **3.7.11. IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- Mengumumkan informasi publik
- Menyediakan informasi publik
- Sarana dan Prasarana
- Kelembagaan
- Digitalisasi

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja 16

<b>SK-6</b>		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
<b>IK-16</b>		Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
<b>Triwulan 1 Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	91	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 16 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.

### **Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

### **Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK**

Kegiatan pada IK 18 menggunakan kriteria penilaian dari Inspektorat KKP dan dilakukan penilaian internal lingkup PKRL oleh Seditjen. Adapun hasilnya cukup baik dan efektif efisien pemberian bantuan KOMPAK lingkup LKKPN Pekanbaru, namun tetap memiliki dampak yang baik untuk masyarakat.

Efisiensi SDM juga dilaksanakan karena SDM Personil pada IK ini berkaitan juga dengan IK 6 terkait Pemberian Bantuan KOMPAK, sehingga personil jauh lebih sedikit dan efisien.

### **Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK**

- Melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan
- Mendapat predikat **Informatif** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2022 – 2024.

## **Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya**

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 16 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 adalah:

### **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 18**

Dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik, LKKPN Pekanbaru melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan

### **3.8. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada tahun 2025 terbagi atas tiga program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp5.973.992.000, program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp675.000.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.350.154.000.

Tabel 42. Realisasi Anggaran Triwulan 1 tahun 2025

Uraian	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu (Rp)	5.973.992.000	675.000.000	9.350.154.000	15,999,146,000
Realisasi (Rp)	0	0	2.162.628.036	17.445.472.954
% Realisasi	0%	0%	23,13%	13,52%

### **Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, LKKPN Pekanbaru melakukan tindak lanjut berupa identifikasi anggaran yang berdampak efisiensi belanja. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru mengalami efisiensi/blokir anggaran sehingga realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 hanya 13,52%..

### **Perbandingan NKO**

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periode Triwulan 1 tahun 2025 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dikarenakan kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 43:

Tabel 43. Perbandingan Capaian NKO dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
1	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
3	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	-	-	-	-
4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
5	Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
6	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
9	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	Sama
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	-	-	-	-
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	105,2	105,2	-	sama
12	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	-
13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
15	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	120	120	-	sama
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>109,47</b>	<b>109,47</b>	<b>-</b>	<b>sama</b>

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO LKKPN Pekanbaru sama dengan BKKPN Kupang.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan 1 Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Indikator Kinerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian dan Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri atas 16 Indikator Kinerja.

Pelaksanaan program kegiatan periode Triwulan 1 Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan seluruh Indikator Kinerja tercapai sesuai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,47 (baik).

### 4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj Triwulan IV tahun 2024 terdapat beberapa tindaklanjut sebagai perbaikan kinerja ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

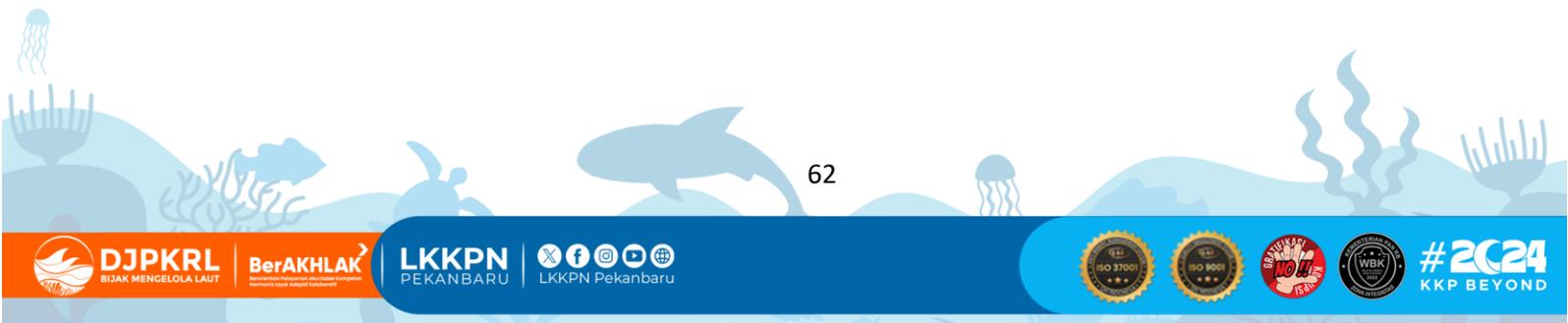
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu dan sesuai prosedur karena pada tahun 2025 sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru yang bersumber dari PNBP	Rapat pendahuluan usulan persetujuan penggunaan PNBP lingkup DJPKRL pasca efisiensi pada tanggal 6 Maret 2025
2.	Pemantauan kinerja secara berkala sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja LKKPN Pekanbaru	Telah dilaksanakannya Rapat Internal membahas progres pemenuhan realisasi kinerja dan Perjanjian Kinerja yang kemungkinan akan mengalami revisi akibat perubahan SOTK baru. Rapat tersebut sesuai dengan Surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.287/LKKPN/TU.330/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

### 4.3. Rekomendasi

Hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan pada laporan kinerja periode selanjutnya, yaitu:

1. melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi
2. Memantau pemenuhan kinerja Triwulan II pasca efisiensi belanja.

# LAMPIRAN



# LAMPIRAN 1.

## SURAT PENYAMPAIAN SPIP TRIWULAN IV TAHUN 2024 DAN TRIWULAN I TAHUN 2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**  
**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**  
**PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [kkpn.pekanbaru@kkp.go.id](mailto:kkpn.pekanbaru@kkp.go.id)

Nomor : B.118/LKKPN/TU.140/I/2025 08 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak nomor B.73/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV Tahun 2024 LKKPN Pekanbaru sebagaimana terlampir.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi  
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL  
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286  
TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [kkpn.pekanbaru@kkp.go.id](mailto:kkpn.pekanbaru@kkp.go.id)

Nomor : B.466/LKKPN/TU.140/IV/2025 14 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan  
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak nomor B.60/DJPK.1/TU.210/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2025 LKKPN Pekanbaru sebagaimana terlampir.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi  
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

# LAMPIRAN 2.

## DATA DUKUNG PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA 11





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [dirjenpk@kkp.go.id](mailto:dirjenpk@kkp.go.id)

Nomor : B. 104 /DJPK.1/HP.140/IV/2025 15 April 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Direktur Lingkup Ditjen PRL
3. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
4. Koordinator Bagian Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 88,64% yaitu sebanyak 78 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 88 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke II Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,  
Miftahul Huda

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PK
2. Direktur Jenderal PRL

Lampiran 1 Surat  
Nomor : B. 104 /DJP.K.1/HP.130/IV/2025  
Tanggal : 15 April 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU  
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan  
Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	14	12	85,71	2	14,29	85,71
2	Dit. PRL	4	3	75,00	1	25,00	75,00
3	Dit. P4K	14	14	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	19	12	63,16	7	26,84	63,16
5	Dit. KKHL	8	8	100	0	0	100
6	BKKPN Kupang	11	11	100	0	0	100
7	BPSPL Makasar	11	11	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
9	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	7	7	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
14	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		88	78	88,64	10	11,36	88,64

a.n. Direktur Jenderal

Pengelolaan Kelautan,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,



Miftahul Huda

# LAMPIRAN 3.

## DATA DUKUNG PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA 15



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

---

**NOTA DINAS**

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan  
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang berdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

Lampiran  
 Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025  
 Tanggal : 14 April 2025

**Inspektorat Jenderal**

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	0	3,074,204,000	100.00%
TOTAL		12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	-	3,074,204,000	100.00%

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PKRL	261,203,332,000	104,939,270,000	156,264,062,000	0	156,264,062,000	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	3,393,333,000	672,730,000	2,720,603,000	0	2,720,603,000	100.00%
3	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	6,375,019,000	3,458,788,000	2,916,231,000	0	2,916,231,000	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	3,431,580,000	1,088,252,000	2,343,328,000	0	2,343,328,000	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,995,766,000	5,319,309,000	14,676,457,000	0	14,676,457,000	100.00%
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	6,830,966,000	1,496,560,000	5,334,406,000	0	5,334,406,000	100.00%
7	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	34,247,947,000	7,929,570,000	26,318,377,000	0	26,318,377,000	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	4,620,954,000	1,558,667,000	3,062,287,000	0	3,062,287,000	100.00%
9	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	25,399,451,000	6,130,465,000	19,268,986,000	0	19,268,986,000	100.00%
TOTAL		365,498,348,000	132,593,611,000	232,904,737,000	-	232,904,737,000	100.00%